

BAB 10

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

10.1 Kesimpulan

DAS Musi meliputi area seluas $\pm 60.000 \text{ km}^2$. DAS Musi merupakan daerah aliran sungai terbesar ke empat di Indonesia. Populasi di daerah aliran adalah lebih dari 6,3 juta dan hal tersebut cukup besar dibandingkan dengan ketiga daerah aliran sungai terbesar lainnya. Daerah aliran sungai Musi sebagian besar berada di Propinsi Sumatera Selatan, tetapi meliputi pula beberapa bagian Propinsi Bengkulu, Jambi dan Lampung. Pembangunan dan konservasi dari daerah aliran sungai menjadi perhatian nasional

DAS Musi memiliki potensi lahan yang luas dan pembangunan beraneka ragam sumber daya. Daerah aliran berada di zona strategis untuk keamanan ketahanan pangan. Air yang ada di daerah aliran sungai digunakan untuk berbagai tujuan, dan sumber daya ini sangat diperlukan tidak hanya untuk masyarakat yang tinggal di daerah aliran tapi juga untuk semua penduduk. Pada daerah aliran, bagaimanapun, pembangunan yang dilakukan sudah mengalami kemajuan dengan tidak memperhatikan akan adanya konservasi daerah aliran, dan sebagai hasil, terdapat berbagai macam masalah.

Pengantar dari Pengelolaan Air secara Menyeluruh menjadi pertimbangan penting dan mendesak untuk merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan menjaga keseimbangan dengan konservasi lingkungan di daerah aliran sungai Musi Rencana Pengelolaan Air secara Menyeluruh dari daerah aliran sungai Musi telah dirumuskan dalam studi ini Rencana pengelolaan ini terdiri dari 6 komponen.

- **Komponen 1: Pengelolaan Tata Guna Air**
- **Komponen 2: Pengelolaan Dataran Banjir**
- **Komponen 3: Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Air**
- **Komponen 4: Perbaikan Lingkungan Air Kota**
- **Komponen 5: Pembuatan Jaringan Pemantauan**
- **Komponen 6: Penguatan Kelembagaan**

Tiap komponen berisi program-program konkrit. Program yang diberi prioritas tertinggi ditetapkan sebagai program prioritas. Rangkuman program telah dipersiapkan untuk dapat mempermudah pengertian garis besar setiap program prioritas. Pada pelaksanaan program prioritas, rencana pelaksanaan telah dipersiapkan; organisasi pelaksanaan dan gugus tugas telah diidentifikasi; biaya dan daftar pengeluaran tahunan telah dipersiapkan; dan, rencana kerja telah dipersiapkan.

Karena berbagai dinas dilibatkan dalam pelaksanaan program prioritas maka koordinasi secara keseluruhan sangat penting. BAPPEDA Propinsi Sumatera Selatan diharapkan

untuk memainkan peranan ini. Hasil evaluasi dari program adalah sebagai berikut: Tidak ada kesulitan teknis untuk pelaksanaan program prioritas jika bantuan teknis dari Negara maju dengan pengalaman pengelolaan air di wilayah Asia muson disediakan. Meskipun dengan pelaksanaan program tidak langsung menciptakan banyak keuntungan ekonomi, hal tersebut dasar untuk kelayakan pengelolaan daerah aliran yang pada akhirnya memberikan keuntungan ekonomi yang besar untuk daerah aliran. Secara finansial, peningkatan pemasukan APBN diperlukan untuk pelaksanaan program prioritas. Hal tersebut diharapkan banyak keuntungan sosial dan lingkungan melalui pelaksanaan program-program prioritas.

Prasyarat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dari rencana pengelolaan diajukan bersamaan dengan; (i) pemeliharaan dari kebijakan desentralisasi oleh Pemerintah Indonesia; and (ii) keputusan Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru dan Peraturan Pemerintah yang baru pada Pengelolaan Sumber Daya Air.

10.2 Rekomendasi

Pelaksanaan program-program prioritas berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan sangat direkomendasikan sebagai tahap pengenalan Rencana Pengelolaan Air secara Menyeluruh di DAS Musi. Pelaksanaan kegiatan utama sebagai awal pelaksanaan pengelolaan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

(1) Kegiatan Persiapan

Direkomendasikan bahwa **BAPPEDA** Propinsi Sumatera Selatan akan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- Usulan Rencana Pengelolaan Air secara Keseluruhan harus disahkan dalam Rencana Strategi, Propinsi Sumatera Selatan 2004 – 2008.
- Surat Keputusan Pemerintah Propinsi untuk pelaksanaan rencana induk yang diajukan harus disiapkan dan disetujui

(2) Perangkat Dasar untuk Pengelolaan Air

Program 1-6: Model Pengelolaan Tata Guna Air adalah salah satu program yang dibutuhkan paling mendesak karena Model ini merupakan perangkat dasar untuk kelayakan pengelolaan air air yang sesuai. Pelaksanaan program ini membutuhkan bantuan teknik dari Negara-negara maju yang memiliki pengalaman dalam pembuatan model pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah Asia Muson. **Direktorat Jendral Sumberdaya Air** direkomendasikan untuk memulai persiapan TOR untuk bantuan teknik tersebut.

(3) Pembuatan Jaringan Kerja Pemantauan

Data hidrologi dan kualitas air dibutuhkan dalam penggunaan Model Pengelolaan Tata Guna Air seperti yang didiskusikan di atas. Tanpa data tersebut, model tidak dapat digunakan dengan layak; sehingga, koordinasi yang

erat dalam penggunaan model pengelolaan tata guna air dibutuhkan. **PSDA Balai Musi** di bawah koordinasi Dinas PU Pengairan direkomendasikan memulai diskusi dengan BMG, BAPEDALDA, PDAM untuk jaringan kerja pemantauan dalam daerah aliran, dan untuk mempersiapkan TOR untuk mendapatkan dana dari APBN.

(4) Pengelolaan Dataran Banjir

Pengelolaan dataran banjir harus dipertimbangkan sebagai sebuah program jangka panjang selama 50-100 tahun, tetapi hal tersebut harus segera dimulai sebelum pembangunan yang tak terkendali berlangsung dalam dataran banjir. Dalam hal ini **Dinas PU Pengairan** berperan besar dalam menentukan arah daerah aliran Sungai Musi di masa mendatang. Dinas PU Pengairan direkomendasikan untuk memformulasikan sebuah grup yang bertanggungjawab untuk memulai tindakan yang diperlukan.

(5) Konservasi dan Rehabilitasi DAS

Dinas Perhutanan Propinsi Sumatera Selatan dapat memulai tindakan awal untuk program konservasi dan rehabilitasi DAS. Pembuatan sebuah gugus tugas dan aktivitasnya dianggap mendesak. Juga direkomendasikan untuk memulai diskusi dengan Kimpraswil untuk memasukan program-program Daerah Aliran Sungai Musi ke dalam “Daftar Prioritas Daerah Aliran Sungai untuk Reboisasi” yang dipersiapkan bersama-sama dengan Menteri Kehutanan dan Kimpraswil.

(6) Perbaikan Lingkungan Air Kota

Dinas Kimpraswil Kotamadya Palembang direkomendasikan untuk memulai pelaksanaan program. Pemilihan LSM yang akan terlibat dalam Program Pengelolaan Drainase Masyarakat dianggap mendesak. Rencana kaji tindak untuk pelaksanaan tugas dari LSM harus disiapkan.

(7) Membuat Batasan yang Jelas dengan WISMP

Dinas PU Pengairan direkomendasikan untuk mengidentifikasi program-program yang berada dibawah WISMP. Hal tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan demi kemajuan dari program-program dalam Daerah Aliran Sungai Musi di bawah WISMP.